LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2023

PEJABAT ESELON II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

NAMA	**:**	**HINDAM ADRI ABADAN, S.IP**
NIP	**:**	**NIP. 19880712 200701 1 002**
PANGKAT	**:**	**PEMBINA TINGKAT I**
GOLONGAN	**:**	**III/D**
JABATAN	**:**	**Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

A.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Kedudukan

- Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A.2 Tugas Pokok

- Satpol PP mempunyai tugas pokok menegak kanPerda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati,serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat Negara dan tamu negara;
- pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupatidan Wakil Bupati;
- membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan

- pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.3 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedukan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danperlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danperlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- Penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A.4 Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

- Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya sedapat mungkin mengedepankan pendekatan persuasif, dan menggunakan pendekatan represif/upaya paksa apabila diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan dilapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjukdan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

A.5 Kerjasama dan Koordinasi

- Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.
- Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya, bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- Kerjasama sebagaimana, didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan herarki dan kodeetik birokrasi.

B. ISU STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta serta Perlindungan Masayarakat , antara lain :

1. Belum adanya relawan petugas penanganan kebakaran
2. Minimnya Sarana dan prasarana terkait penanganan kebakaran dan non kebakaran
3. Belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran
4. Terbatasnya sumber daya manusia dalam penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Perda/Perkada

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS

A. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan yaitu ***" Meningkatnya Kepuasan Masyarakat"***

B. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sasaran adalah Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan

kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur dan sarana sedikit banyak akan mempengaruh jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersedian sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan.Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 5 (lima) Tahun kedepan (2018 – 2023) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum, untuk selanjutnya taraget sasaran dan tujuan bisa kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang

T U J U A N	SASARAN	INDIKATOTR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan ketenteraman dan Ketertibn Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	80.1	76	83,6	82,63	83	83,5
	Mingkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Presentase Penegakan Perda / Perkada	100%	100%	100%	85%	85%	85%
		Presentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : 1. Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit	100%	94,59%	100%	35%	40%	75%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan capaian kinerja sebagai berikut :

A.2 Capaian Kinerja Tujuan

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83	77,88	94	Penilaian dari bagian organisasi

A.3 Capaian Kinerja Sasaran:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam		Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83	77,88	94	
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda/Perkada	85%	85%	100 %	
		Perentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan: Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit	75%	70,70%	94,26%	

Keterangan:

Indikator I

Persentase Penegakan Perda/Perkada, formulasi penghitunganya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda/Perkada pada tahun N}} \times 100\%$$

Untuk menghitung/menjabarkan formulasi indikator diatas dasar penghitunganya adalah diambil dari data pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2023. Adapun data pelanggaran dimaksud pada tabel data pelanggaran Perda/Perkada berikut ini:

Tabel 3.3
Data Pelanggaran Perda/Perkada
Triwulan IV Tahun 2023

No	Jenis Pelanggaran	Peraturan Daerah	Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada (Kasus)
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 13 Tahun 1995 - Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah	-	36
2	Penyelenggaraan Jalan	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Jalan	-	1
3	Pemotongan Hewan	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Pajak Pemotongan Hewan	-	3
4	Retribusi Kartu Pemilikan Ternak di Wilayah Kabupaten Lumajang	Peraturan Daerah Lumajang Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Kartu Pemilikan Ternak di Wilayah Kabupaten Lumajang	-	2
5	Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi	Peraturan bupati Lumajang No.64 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama	13
6	Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang	-	437

No	Jenis Pelanggaran	Peraturan Daerah	Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada (Kasus)
7	Ijin Mendirikan Bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Perturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	2
8	Tambang ilegal	1. Peaturan Daerah Kabupaten Lumajang No 18 Tahun 2006 Tentang Ijin Pertambangan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Perubahan Atas Peraturan Bupati No.44 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	2
10	Pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten Lumajang	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2009 - Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang	-	1
11	Penyelenggaraan Reklame	Peraturan Bupati Lumajang No.54 Tahun 2016 - Penyelenggaraan Reklame	-	7.108
12	Tempat Penimbunan (Stockpile) Terpadu	-	Peratura Bupati Lumajang No.40 Tahun 2022 - Tempat penimbunan pasir (stokcpile) terpadu	49
13	Tamu Wajib Lapor	Peraturan Daerah Kabupaten Llumajang No. 9 Thun 2007 Tentag Wajib Lapor Tamu/Pendatang Lebih 1X24 jam Dalam wilayah Kabupaten Lumajang	-	2
14	Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 - Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	-	4
	Total Jumlah Penegakan Perda/Perkada			7.660

Dari table di atas maka Persentase Penegakan Perda/Perkada adalah:

$$= \frac{\text{7.660 kasus pelanggaran yang diselesaikan sampai Triwulan IV Tahun 2023}}{\text{9.001 kasus pelanggaran sampai Triwulan IV Tahun 2023}} \times 100\%$$

= 85,%

Analisa capain kinerja:

Jumlah pelanggaran pada triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 9.000 pelanggaran dengan kasus pelanggaran yang diselesaikan 7.660 kasus sehingga presentase

Penegakan Perda/Perkada pada triwulan IV Tahun 2023 sebesar 85 %, capaian kinerja sebesar 100 %

Adapun penyebab keberhasilan penegakan yaitu Komonikasi yang intens dan bersinergi dengan jajaran terkait

Indikator II

Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) perhitungan formulanya adalah

$$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu } \textit{Tanggap} \textit{ (Respon Time Rate } \text{ pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \; X\ 100\%$$

Penjelasan :

Tingkat Waktu tanggap *(Respon Time Rate)* 15 Menit/Permendagri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standart Tekhnis Pelayanan Dasar Pada Standart Peleyanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud adalah dari menerima pengaduan kejadian kebakaran sampai petugas pemadam tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKB) waktunya 15 menit, untuk selanjutnya data response time rate s/d Triwulan IV Tahun 2023 bisa kita lihat pada table berikut ini:

Tabel. 3.4
Data Penanganan Penanggulangan bencana Kebakaran
Triwulan IV Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Kebakaran	Response Time	Tidak Respon Time
1	Januari	3	2	1
2	Februari	2	1	1
3	Maret	6	6	0
4	April	1	1	0
5	Mei	7	5	2
6	Juni	9	8	1
7	Juli	13	5	8
8	Agustus	9	6	3
9	September	19	16	3
10	Oktober	11	7	4
11	November	12	6	6
12	Desember	7	7	0
	Jumlah	***99***	***70***	***29***

Dari tabel diatas Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) bisa dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{\textit{70 kejadian kebakaran yang sesuai respon time}}{\textit{99 kejadian kebakaran}} \; \textit{x100\%}$$

= 70,70 %

Dari perhitungan diatas realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) pemadam kebakaran adalah 70,70 %, sedangkan target tahun 2023 adalah 75 %, dengan capaian kinerja pada triwulan IV sebesar 94,26 %.

Adapun faktor tidak tercapainya adalah:

1. Belum terbentuknya Wilayah Manajamen Kebakaran, sehingga kejadian kebakaran berjarak di atas 8 Km tidak bisa tertangani sesuai respon time
2. Call center pemadam kebakaran belum diketahui secara menyeluruh oleh masyarakat Lumajang.
3. Kondisi mobil pemadam kebakaran yang terlalu tua sehingga kurang maksimal dalam penanganan keejadian kebakaran
4. Keterlambatan pihak pelapor atas kejadian kebakaran
5. Lalu lintas yang padat, sehingga pengaruh terhadap penanganan kejadian kebakaran
6. Tempat kejadian kebakaran jauh dari sumber mata air

Tabel 3.5
Pemenuhan Capaian Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Capaian Kinerja			Rasio Capaian Kinerja		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada	61,43%	N/A	N/A	37,63%	N/A	N/A	61,26%	N/A	N/A
		Presentase Pelanggaran Masyarakat yang di Tindaklanjuti oleh Linmas	73%	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	136,99%	N/A	N/A
		Persentase Penegakan Perda/Perkada	N/A	100%	85%	N/A	83%	85%	N/A	83%	100%
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)	35%	100%	75%	100%	70%	70,70%	285,71%	70%	94,26%

Tabel 3.6
Data Realisasi Sasaran Program dan Anggaran
Triwulan IV Tahun 2023

No	Program	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023	
1	2	4	4		5		6	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100 %	4.882.815.817	100 %	4.728.312.678	100 %	96,84 %
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	9.690.054.247	95 %	9.008.967.314	96 %	96,97 %
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100 %	544.287.720	100 %	540.842.000	100 %	99,37 %

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut adalah program / kegiatan yang telah mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Saatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja, sebagai berikut :

B.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Triwulan IV:

Tabel 3.7
Data Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran S/D TW IV Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
1	2	3			4			5 = 4/3x100%		
		K		Rp	K		Rp	K		Rp(%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100	%	4.882.815.817	100	%	4.728.312.678	100	%	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100	%	720.000	100	%	720.000	100	%	100
Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	3	doku		2	dok		67		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah		men			umen	-		dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	720.000	5	laporan	720.000	100	laporan	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	3.615.164.992	100	%	3.499.386.798	100	%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	orang/bulan	3.554.527.992	12	orang/bulan	3.438.749.798	100	orang/bulan	100
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	59.647.000	12	dokumen	59.647.000	100	dokumen	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	990.000	5	laporan	990.000	100	laporan	100

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	laporan	-	18	laporan	-	100	laporan	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100	%	134.566.219	100	%	123.499.407	100	%	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	paket	10.520.469	25	paket	10.324.500	100	paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	81.479.040	4	paket	81.376.700	100	paket	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	laporan	8.862.710	2	laporan	8.859.500	100	laporan	100

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	33.704.000	12	laporan	22.938.707	100	laporan	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100	%	625.916.000	100	%	604.462.217	100	%	100
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12	laporan	56.000	12	laporan	52.000	100	laporan	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	119.040.000	12	laporan	99.123.892	100	laporan	100
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	506.820.000	12	laporan	505.286.325	100	laporan	100

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100	%	506.448.606	100	%	500.244.256	100	%	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	unit	485.848.606	40	unit	479.977.256	100	unit	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	unit	20.600.000	5	unit	20.267.000	100	unit	100
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	9.690.054.247	80	%	9.008.967.314	80	%	100
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	5.206.831.394	100	%	4.739.052.264	100	%	100

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	60	kasus	462.000.000	60	kasus	461.100.000	100	kasus	100
Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	2.841	kasus	3.055.451.644	2841	kasus	2.594.332.514	100	kasus	100

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12	dokumen	478.717.000	12	dokumen	476.888.000	100	dokumen	100
Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12	dokumen	14.040.000	12	dokumen	14.040.000	100	dokumen	100
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	80	orang	140.145.000	80	orang	137.354.000	100	orang	100

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam tekhnik pencegahan kejahatan	12	dokumen	1.056.477.750	12	dokumen	1.055.337.750	100	dokumen	100
Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100	%	4.483.222.853	100	%	4.269.915.050	100	%	100
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha	12	laporan	2.975.836.200	12	laporan	2.868.264.750	100	laporan	100

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	laporan	30.884.000	12	laporan	30.238.000	100	laporan	100
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	laporan	1.476.502.653	12	laporan	1.371.412.300	100	laporan	100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100	%	544.287.720	100	%	540.842.000	100	%	100

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	100	%	544.287.720	100	%	540.842.000	100	%	100
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	laporan	453.930.000	12	laporan	452.226.000	100	laporan	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4	unit	5.775.000	4	unit	5.184.000	100	unit	100

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran P Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	27	orang	84.582.720	27	orang	83.432.000	100	orang	100

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Satuan Polisi pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dengan target sebesar 83 , dan realisasi sebesar 77,88/capaian kinerja sebesar 94%
2. Capaian Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Triwulan IV Tahun 2023 terdiri atas 1 sasaran yakni ***Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat***. Dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator yakni:
   a. Persentase Penegakan Perda/Perkada dengan target 85% dan realisasi sebesar 85 %/ capaian kinerja sebesar 100 %.
   b. Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) dengan target sebesar 75% sedangkan realisasinya sebesar 70,70% /capaian kinerja sebesar 94,26%
3. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada Triwulan IV menujukkan keberhasilan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya menindaklanjuti indikator yang masih dipandang kurang berhasil upaya yang dilakukan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kembali indikator dan target pada sasaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang di dalam Matrik Renstra OPD tahun 2018-2023 yang nantinya dijadikan sebagai bahan revieu Rentra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

2. Mengoptimalkan Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat terhadap produk Hukum Daerah
3. Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga terkait peningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya bencana kebakaran dengan cara memberikan penyuluhan/edukasi kepada masyarakat/badan usaha dalam hal pencegahan sedini mungkin terjadinya bencana kebakaran.

Demikian laporan kinerja ini disampaikan sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

Lumajang, 31 Desember 2023

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP

NIP. 198807122007011002